

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN
BREBES SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 79 TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ACHMED RIFO ALCHAQIE

NPM 5117500051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BREBES SESUAI
DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019**

Achmed Rifo Alchaqie

NPM 5117500051

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 16 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H

NIDN. 0613035701

Pembimbing II



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.

NIDN. 0020045801

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Muhammad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN.0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BREBES SESUAI
DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019**

Achmed Rifo Alchaqie
NPM 5117500051

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 16 Agustus 2021

Penguji I



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Penguji II



Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.
NIDN. 0617026101

Pembimbing I



Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 0613035701

Pembimbing II



H. Fani Haryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmed Rifo Alchaqie
NPM : 5117500051
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 15 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI
KABUPATEN BREBES SESUAI DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN
2019**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 16 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Achmed Rifo Alchaqie

Abstrak

Pada masa otonomi daerah saat ini percepatan perekonomian di setiap daerah perlu ditingkatkan guna mengurangi kesenjangan daerah. Investasi dan kawasan industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dalam hal ini perizinan kepada Pemda setempat harus berjalan sesuai dengan *good governance*.

Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui Pelaksanaan Good Governance di Kabupaten Brebes Merujuk Pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi di Jawa Tengah (2) Mengetahui Kendala Pelaksanaan Good Governance Atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes

Jenis Penelitian adalah jenis yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis –sosiologis, serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik pengumpulan kepustakaan dari dokumen atau literatur terkait didukung dengan pengumpulan data secara daring serta dengan penelitian lapangan dan wawancara. Penelitian ini dianalisis dengan digunakan metode analisis normatif kualitatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* atas pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perekonomian Jawa Tengah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip efektifitas dan efisien dapat dikatakan sudah sesuai. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *good governance* atas pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perekonomian Jawa Tengah meliputi kendala fisik geografis Kabupaten Brebes serta SDM serta teknologi IT dalam peningkatan kualitas perizinan DPMPSTSP Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : *Good Governance*, Perpres Nomor 79 Tahun 2019, Brebes

Abstract

At the current period of regional autonomy, economic acceleration in each region needs to be increased to reduce regional inequality. Investment and industrial estates are one of the efforts to improve the economy in this case licensing to the local government must run in accordance with good governance.

This research aims (1) to Know the Implementation of Good Governance in Brebes Regency Referring to Presidential Regulation No. 79 of 2019 concerning the Acceleration of Economic Area Development in Central Java (2) Knowing the Constraints of Good Governance Implementation of Presidential Regulation No. 79 of 2019 in Brebes Regency

This type of research is a type of juridical-empirical using a juridical-sociological approach, as well as data collection techniques through literature collection techniques from related documents or literature supported by online data collection and by field research and interviews. This research is analyzed with the use of qualitative normative analysis methods, which is a way of interpreting and discussing the material of research results based on the understanding of law, legal norms, legal theories and doctrines related to the subject matter.

The results of this study show that the application of the principle of good governance to the implementation of Presidential Regulation No. 79 of 2019 concerning the Acceleration of Development of the Central Java Economic Area used in this study using the principle of accountability, the principle of transparency and the principle of effectiveness and efficiency can be said to be appropriate. The obstacles faced in the application of the principle of good governance on the implementation of Presidential Regulation No. 79 of 2019 concerning the Acceleration of Development of the Central Java Economic Area include geographical physical constraints of Brebes Regency as well as Human Resources and IT technology in improving the quality of licensing of DPMPTSP Brebes Regency.

Based on the results of this study, it is expected to be an information and input material for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti Tegal University.

Keywords: Good Governance, Presidential Regulation No. 79 of 2019, Brebes

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kepada Nenek dan Kakek saya H. Achmad Ghozali dan Hj. Suwarni yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
- Kepada Ibu dan Papi saya Farah Intrawati,S.E dan Setyo Pudjiantoro yang selalu ada di setiap jalan kehidupan yang saya lalui dan menjadi penyemangat di saat mulai putus asa.
- Kepada Bapak saya, Edhie Trisianto,S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan bekal agama untuk kehidupan saya.
- Kepada Pakde dan Budhe saya, Widagdo Oreyanto,S.H dan Tri Sakti Handayani,S.H yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil.
- Kepada Frisca Resty Yuni Pratiwi,Amd.Ak. Yang selalu memberikan dukungan moril dan selalu meluangkan waktu untuk membantu saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi di detik-detik terakhir.
- Kepada Ragil Sirajudin, S.H selaku kenet saya selama 8 semester.
- Kepada Paojan Pasaribu, S.H yang selalu terbuka 24 jam pintu rumahnya untuk saya.
- Saudara-saudara Azwar Family yang selalu memberiku dukungan dan doanya
- Saya ucapkan banyak Terimakasih kepada Keluarga Besar Grup Oposisi/Poyok Squad yang banyak melukis cerita dalam kehidupan Saya selama di Kampus..
- Teman-teman kelas b yang selalu memberikan semangat serta dukungan.

MOTTO

“Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.”

(Gus Dur)

“Merasa paling pintar adalah puncak kebodohan yang sebenarnya.”

(Emha Ainun Nadjib)

“Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, akan sulit bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain.”

(Gus Mus)

“Takdir adalah apa yang sudah diputuskan kepadamu. Nasib adalah bagaimana keputusanmu menggunakan waktu.”

(Sabrang MDP)

“Proses sama penting dengan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan.”

(Sudjiwo Tejo)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).

7. Dr. Imawan Sugiharto S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I), H. Toni Haryadi, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semual amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 16 Agustus 2021

Penulis

Achmed Rifo Alchaqie

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	13
A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	13
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	13
2. Pengertian Peraturan Otonomi Daerah	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	26
1. Pengertian Pemerintah Daerah	26
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	29
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	31
C. Tinjauan Umum Investasi dan Penanaman Modal.....	35
D. Asas Tujuan Penanaman Modal	40
E. Tinjauan Umum Kawasan Industri.....	44

1. Pengertian Kawasan Industri.....	44
2. Jenis dan Macam-macam Industri	45
F. Tinjauan <i>Good Governance</i>	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> di Kabupaten Brebes Merujuk Pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi di Jawa Tengah... ..	58
B. Kendala Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes.....	66
BAB IV PENUTUP	71
1. Simpulan	71
2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹ Tujuan Negara Republik Indonesia tertuang di dalam UUD 1945 Alenia keempat yaitu (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia (2) Memajukan Kesejahteraan Umum (3) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (4) Ikut Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengukuhan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara telah membuka peluang penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan Amendemen Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memperjelas paham negara hukum terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Sedangkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, Implementasi paham negara hukum

¹Sabine, 2006, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 147.

materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Demi terwujudnya negara kesejahteraan, maka harus di mulai dari penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) yang berarti memprioritaskan hukum sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan negara.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.² Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar , adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Progresifitas Indonesia sebagai negara berkembang dalam mengadopsi konsep *good governance* dalam tataran yuridis formil dan institusional dengan menghasilkan begitu banyak aturan hukum (*laws*) dan pembentukan organ-organ baru (*new agents*) dalam tubuh pemerintahan Indonesia seringkali menjadikan pemerintah terlihat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun apabila diperhatikan dari perspektif implementasi,

²Jimly Asshiddiqie, 2003, Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, hlm. 3.

penerapan aturan dan optimalisasi fungsi dan peran-peran organ baru tersebut masih tidak maksimal. Inilah yang menjadi fenomena di banyak negara berkembang seperti Indonesia dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).³

Pada awal reformasi pemerintahan mengalami transformasi sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Peraturan tersebut tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir di revisi kembali menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang di jalankan. Untuk itu, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi.⁴

Melalui desentralisasi kebijakan daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan, Kewenangan pemerintah pusat hanya meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan nasional secara makro. Perencanaan pembangunan di Indonesia bukan merupakan hal baru di

³Andi Hakim,” *Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi)*”

⁴Busrizalti H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Total Media. Yogyakarta, 2013.

Indonesia sistem ini sudah di mulai sejak kemerdekaan indonesia diproklamasikan. Peranan dari perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan, karena adanya pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001 yang menyebabkan peranan pemerintah menjadi sangat penting dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Good Governance merupakan konsep penyelenggaraan kekuasaan negara yang baik. Yang dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis serta yang mampu mewujudkan kehidupan yang demokratis di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Tataan birokrasi yang efisien merupakan langkah awal pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan publik termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Perwujudan *Good Governance* di Kabupaten Brebes dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan kawasan industri Brebes. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Brebes berkoordinasi dengan Kementrian Perekonomian dan Industri. Hal tersebut dilakukan untuk saling menjembatani antara pihak pengelola kawasan industri brebes dengan pihak investor. Kabupaten Brebes masuk kedalam salah satu daerah di jawa tengah yang masuk ke dalam proyek strategis nasional sebagaimana terlampir di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, hal tersebut guna memulihkan perekonomian Kabupaten Brebes serta peluang besar penyerapan tenaga kerja lokal sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi lebih maju.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penelitian hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE di KABUPATEN BREBES SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO 79 TAHUN 2019”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ?
2. Bagaimanakah kendala pelaksanaannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance*.
2. Untuk Mengetahui dampak penerapan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata secara teoritis maaupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Administrasi khususnya mengenai *Good Governance* dalam skala pembangunan nasional.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji penerapan *Good Governance* di Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengkaji hambatan-hambatan Pemerintah daerah dalam melaksanakan *Good Governance*

E. Tinjauan Pustaka

Berikut ini peneliti deskripsikan penelitian terkait dengan Judul *Implementasi Good Governance di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019*, Untuk itu peneliti menunjuk dan menghadapkan peneliti yang lain, berikut peneliti paparkan :

1. Caroline , *Perencanaan Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Brebes Sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* , Universitas Sultan Fatah Demak, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 10, Nomor 1, April 2009:51-64.⁵ Posisioing dengan penelitian saya adalah Pemerintah Kabupaten Brebes dituntut untuk segera menuntaskan persoalan yang menjadi faktor penghambat terhadap Perencanaan Kawasan Industri di Kabupaten Brebes.
2. Made Agus Wira Andika dan I Nyoman Sukraaliawan, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi*

⁵Caroline, *Perencanaan Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Brebes Sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* , April 2009, Universitas Sultan Fatah Demak, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 10, Nomor 1 :51-64

*Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.*⁶ Posisioning dengan penelitian ini adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik pada kantor UPTD di Kabupaten Brebes dalam upaya menghadapi antusiasme masyarakat dalam membayar pajak terhadap peningkatan Pendapatan Daerah.

3. Alent R. Tumengkol, *Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance*, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015.⁷ Posisioning dengan penelitian adalah masyarakat dituntut agar pro aktif sebagai salah satu elemen untuk mewujudkan Good Governance di Kabupaten Brebes.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tahap yang harus dilalui dalam proses penelitian. Penelitian sendiri adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.⁸

Metode Penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian berjudul *Implementasi Good Governance di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019* adalah penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau

⁶Made Agus Wira Andika dan I Nyoman Sukraaliawan, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng*

⁷Alent R. Tumengkol, *Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance*, an-Mar/2015 Lex Administratum, Vol. III/No.1

⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 2010, Jakarta, Granit, hlm.2.

keistemewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Implementasi *Good Governance* di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu prosedur yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹¹ Disini berarti menitikberatkan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung ke Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes.

3. Sumber data

Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

⁹Saryono, "Metode Penelitian Kualitatif", 2010, Bandung, PT Alfabeta, hlm.1.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1985, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.52.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hlm.51.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹² Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang di dukung dengan wawancara terhadap informan. Dalam sumber data primer peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar peneliti lebih jelas dalam melihat penerapan *Good Governance* secara langsung akan melakukan wawancara kepada kepala dan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes khususnya bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes agar peneliti lebih mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan serta menjalankan *Good Governance*.

Kemudian peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari kepustakaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil

¹²Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ,hlm.30.

penelitian dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu Buku yang berkaitan dengan Judul peneliti, Jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti, karya ilmiah perorangan yang berkaitan dengan judul peneliti, internet artikel dan surat kabar yang berkaitan dengan topik peneliti yang mengenai Implementasi *Good Governance* di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini untuk mencari teori, pendapat, ataupun penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, berupa :Peraturan Perundangan, Karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Ekonomi dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁴ Dengan wawancara diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai Implementasi *Good Governance* di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Teknik pengumpulan data penulis akan wawancara dengan

¹³Marzuki,*Metodologi Riset*, 1983, Yogyakarta, PT.Hanindita Offset, hlm.56.

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1997 "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*," Jakarta,Ghalia Indonesia, hlm.57

pegawai pemerintah daerah Kabupaten Brebes mengenai Implementasi *Good Governance*, hambatan pemerintah daerah, dan cara penyelesaian pemerintah daerah dalam Implementasi *Good Governance* di Kabupaten Brebes.

5. Metode Analisis data

Pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁵. Dalam metode analisis data peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di pemerintah daerah Kabupaten Brebes dan hasil kuisioner masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes kemudian menganalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan skripsi oleh peneliti.

G. Rencana sistematika penulisan

Untuk mempermudah memahami dan mengetahui hal pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan deskripsi pada bagian ini yang di susun 4 (empat) bagian bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengembangan dari proposal memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, jadwal penelitian,

¹⁵Lexy J Moleong, 2013, "*Metode Penelitian Kualitatif.Edisi Revisi.*" Bandung,PT Remaja Rosdakaryaa hlm.248.

dan daftar pustaka. Sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan pengantar pada inti pembahasan.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Bab ini meninjau tentang pengertian, manfaat, konsep *Good Governance*, tugas pemerintah daerah Kabupaten Brebes terkait *Good Governance*, indikator dalam penerapan *Good Governance*.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa uraian rumusan masalah tentang Implementasi *Good Governance* di Kabupaten Brebes, Tingkat Partisipasi masyarakat dan hambatan pemerintah daerah dalam menerapkan *Good Governance* di Kabupaten Brebes.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan seluruh uraian dari hasil penelitian yang diteliti dan dikemukakan sekaligus jawaban terhadap permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri¹⁶. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. Dari pengertian otonomi daerah adalah otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, maka akan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran negara¹⁷. Oleh karena itulah, membicarakan makna otonomi dalam otonomi daerah bukan berarti kebebasan berekspresi seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonom tidak berlawanan

¹⁶BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007, hlm. 350.

¹⁷I Wayan Arthanaya, "Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011, hlm. 178.

dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Secara global, isu mengenai otonomi daerah banyak mengemuka di negara-negara utamanya menyangkut persoalan penyebaran kekuasaan kekuasaan (*dispersion of power*) sebagai manifestasi riil dari demokrasi. Dengan kata lain, otonomi daerah sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori “*areal division of power*” yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Pembilahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kembali lagi kepada sistem pemerintahan negara yang dianut. Dua premis mengemuka terkait pembilahan kewenangan tersebut disesuaikan dengan sistem negara yakni kekuasaan yang terpisah (*power separation*) dalam sistem federalisme dan kekuasaan yang terpisah (*power sharing*) dalam negara kesatuan/unitarianisme.

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia cita desentralisasi tersebut senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan negara. Perwujudan cita-cita desentralisasi telah dilakukan langkah-langkah penting dalam perumusan kebijakan politik sampai pada tingkat perumusan kebijakan di bidang perundang-undangan. Adanya pilihan pada pemencaran kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara, yakni adanya kekuasaan pemerintah pusat dan kekuasaan pemerintah daerah dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi (*Decentrakisatie Wef*) Tahun 1903. Berdasarkan pengalaman empiris desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi dan melembaga.¹⁹

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara unitaris yang terdesentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Selanjutnya, pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (6) merupakan dasar konstitusional bahwa Indonesia adalah negara unitaris yang terdesentralisasi. Pada tataran konstitusi, mungkin sebagian besar bangsa Indonesia tidak lagi mempermasalahkan bentuk negara tersebut, meskipun ada gerakan-gerakan yang ingin mengubahnya menjadi negara federalis.²⁰ Bahkan dapat dinyatakan, desentralisasi sudah menjadi kesepakatan bangsa sejak awal kemerdekaan.²¹

¹⁸Ibid, hlm. 12

¹⁹HAW. Widjaja, *op erf*, hlm. 18

²⁰St. Sularto dan T. Jakob Koekerits (penyunting). 1999. *Federalisme Untuk Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas. Atau buku Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (penyunting). 2002. *Kontroversi Negara federal Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*. Bandung: Penerbit Mizan.

²¹Lihat, UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah yang menggambarkan semangat desentralisasi pada awal kemerdekaan.

Revolusi (paradigma) desentralisasi di Indonesia telah mengalami perubahan hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan tiga undang-undang yang terakhir, yakni: UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dan Terakhir Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Pengertian Tentang Peraturan Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global (*penduniawian, penjagadan*) dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,

serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Kebijakan politik hukum pemerintah guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan peningkatan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²²HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja GrafindoPersada, 2007, hlm. 36.

Dalam hal hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan arti luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.²³ Sementara menurut Ripley dan Franklin implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keiuaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikat pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk program berjalan.²⁴ Bagaimanakah pengaturan asas desentralisasi dan tugas pembantuan menurut Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

Asas Desentralisasi Pengertian asas desentralisasi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan dikalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan asas ini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Perdebatan yang muncul diakibatkan oleh

²³Budi Winarto, *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek*, Jogjakarta: Media Pressindo, 2007, hlm. 144

²⁴ *Ibid*, hlm. 145

arah pandang dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan beberapa pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan yang sama antara Hazairin, Kartasapoetra, Koswara, Seligman, dan Van Berg yang menganggap bahwa desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah.

Sementara De Ruiters berpandangan bahwa penyerahan kekuasaan atau wewenang ini terjadi bukan dari pemerintah pusat, tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah. Dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pemaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal; (1) kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/ pemerintah kepada yang lain; (2) pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang disertai kewenangan tersebut; (3) pejabat yang menyerahkan kewenangan

tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah disertai kewenangan itu, mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan itu; serta (4) pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah disertai kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah disertai kewenangan dari tempatnya. Kedua, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan Logemann dan Litvack bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi Litvack lebih jauh memaknai pelimpahan karena juga bisa kepada sektor swasta. Sementara Ateng menjadikan sarana dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dalam rangka desentralisasi.

G. Shabir Cheema, John R. Nellis dan Dennis A Rondinelli memandang bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah itu berkisar Dalam sistem desentralisasi itu, dikenal ada tiga ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu: (i) ajaran rumah tangga materiil; (ii) ajaran rumah tangga formil, dan (iii) ajaran rumah tangga nil.²⁵ (1). Ajaran Rumah Tangga Material. Menurut ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat, seseorang harus melihat kepada materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintah daerah atau pusat itu masing-

²⁵ Jimlly Asshiddiqie, *op.of*, hlm. 424-426.

masing. Setiap pemerintahan apakah ia pusat atau daerah hanya akan mampu menyelenggarakan urusan tertentu dengan baik. Dalam praktik ajaran rumah tangga materiil dapat dipertahankan sepanjang sifat pemerintahan daerah masih sederhana. Sedangkan untuk menghadapi sifat pemerintahan yang sudah maju, yang semakin kompleks, dan modern, agak sulit bagi kita untuk secara objektif menilai mengenai urusan mana yang sebaiknya diselenggarakan oleh pusat atau daerah. Oleh sebab itu mana yang akan dipilih sebagai urusan pusat dan daerah, seringkali ditentukan secara subjektif semata-mata berdasarkan pertimbangan kekuasaan. Dengan ukuran penilaian yang bersifat subjektif itu, orang pun akhirnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan antara satu sama lain. (2) Ajaran Rumah Tangga Formal. Berhubung dengan kelemahan dan kekurangan ajaran rumah tangga materiil tersebut di atas, maka berkembang pula ajaran rumah tangga formil.

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ajaran materiil, orang mencari pegangan yang tegas kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat formil yang mengatur bahwa suatu hal itu merupakan urusan rumah tangga pemerintah pusat dan hal yang lain sebagai urusan daerah. Pengaturan tersebut didasarkan atas daya guna pemerintahan masing-masing. Jika sesuatu hal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan mendatangkan manfaat yang lebih besar, maka terhadap hal itu dipandang lebih baik ditentukan sebagai urusan rumah tangga daerah. Penyerahan dilakukan secara formil dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hal-

hal yang menjadi urusan daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang. Dengan demikian orang dapat melihat bahwa suatu urusan merupakan rumah tangga pemerintah daerah karena oleh pusat telah dilakukan penyerahannya dengan Undang-Undang. (3) Ajaran Rumah Tangga Riil. Istilah rumah tangga riil dapat dijumpai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Juga dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/ MPRS/ 1966, terdapat istilah yang sama dengan tambahan kata-kata "seluas-luasnya". Dari kedua ketentuan tersebut dapat diketahui apa yang dimaksud dengan Rumah Tangga Riil yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata. Umpamanya pada satu hal karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaatnya yang sebesar-besarnya suatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional dinilai perlu diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pemerintah pusat akan menjadi berkurang. Tentu saja segala penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tentang pembagian urusan

pemerintahan yaitu pada ayat;²⁶ (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan kecildanmenengah, j. Pengendalian lingkungan hidup; k. Pelayanan pertanahan; l. Pelayanan kependudukan; m. Pelayanan administrasi umum; n. Pelayanan administrasi penanaman modal; o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

(2) Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sementara itu berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada ayat berikut;²⁷ (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

²⁶ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125.

²⁷ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125.

- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan;
- m. Pelayanan administrasi umum;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p.

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (2). Urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Asas Tugas Pembantuan Pengertian Asas Tugas Pembantuan. Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.²⁸ Tujuan diberikannya tugas pembantuan (Medebewind) adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan

²⁸ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125

karakteristiknya.²⁹ Ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yakni:³⁰

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa, dasarnya adalah mulai dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada Undang-Undang pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
 - b. Adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan pemberian pelayanan dengan mempergunakan "asas mendekati konsumen" (*Close to the costumer*); diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dari daerah tingkat atas kepada daerah tingkat di bawahnya). Pengertian desentralisasi di sini hanya sekitar penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. Otonomi hanya ada kalau ada penyerahan (*overdragen*) urusan pemerintahan kepada daerah.
- Ketegangan atas tarik ulur kewenangan yang muncul sampai sekarang ini,

²⁹Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokus Media, 2006, hlm. 2.

³⁰*Ibid*, hlm. 2.

semuanya mengacu kepada pembagian kekuasaan atau kewenangan, dan siapa yang paling berwenang mengurus atau mengatur urusan tersebut. Pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah tingkat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dapat dijadikan sebagai terminal menuju "penyerahan penuh" suatu urusan kepala daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³¹

³¹ Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Istilah pemerintah menurut Bagirmanan, berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti “suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan social, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara”. Istilah “pemerintah” ini pula yang oleh kebanyakan kalangan menyepadankan dengan istilah *government* (bahasa Inggris) dan *gouvernement* (bahasa Perancis) yang keduanya berasal dari perkataan Latin *gubernaculum*, yang artinya “kemudi”. Istilah pemerintah ini sering pula disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama dengan eksekutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan pemerintahan secara riil dan ada pula yang mengistilahkan pemerintah dengan jawatan atau aparatur dalam susunan pemerintah.

Sementara itu, istilah “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*administration*” yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Selanjutnya Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Syafruddin, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan

kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif.

Menurut Bagir Manan dengan mengacu kepada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada perbedaan yang sangat nyata antara "Negara" dan "Pemerintah". Negara adalah sebuah badan (*body*), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan Negara (*organ*). Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabangcabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Roda pemerintahan negara secara sehari-hari dilakukan berdasarkan kewenangan eksekutif.

Dengan demikian eksekutif memegang fungsi tata usaha negara yang sering dikenal sebagai administrasi negara. Lazimnya rentang atau ruang lingkup administrasi negara, dikonstruksikan dalam bentuk

kewenangan–kewenangan negara diluar urusan legislatif dan yudikatif. Pada perkembangan berikutnya, karena tugas pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan umum, maka kegiatan administrasi negara dikenal sebagai suatu kebijakan publik, yang memiliki rentang pengaturan dalam kuantitas dan kualitas seiring dengan kebutuhan konkrit masyarakat sehari-hari.

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (1), dijelaskan mengenai tugas dari kepala daerah, tugas yang dimaksud yaitu:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama

- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. dihapus.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan tugas dari wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66 ayat (1), yaitu:
 - a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Didalam melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.³²

Kemudian didalam melaksanakan tugas yang telah dijelaskan sebelumnya, kepala daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³³

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

³² Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan ... *Op.Cit.* hlm. 104.

³³ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daaerah.

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.³⁴

Adapun fungsi pokok dari lembaga perwakilan (parlemen) itu pertama-tama adalah pengawasan terhadap eksekutif, kemudian barulah fungsi legislate (fungsi pembuatan undang-undang). Bentuk-bentuk pengawasan oleh parlemen itu bermacam-macam. Apabila kita meneliti konstitusi berbagai Negara di dunia kita dapat menemukan beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh lembaga parlemen terhadap kinerja pemerintah. Diantara bentuk-bentuk yang penting dalam rangka pengawasan adalah :

- 1) mengangkat dan memberhentikan kabinet

³⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) hak menentukan dan mengawasi anggaran dan keuangan;
- 3) melindungi hak milik dan kekayaan warga masyarakat;
- 4) menyelenggarakan forum perdebatan parlemen;
- 5) melakukan dengar pendapat;
- 6) hak interplasi dan pertanyaan;
- 7) melaksanakan fungsi pemerintahan secara bersama;
- 8) melaksanakan fungsi semi-legislatif dan semi-judisial.³⁵

Untuk mewujudkan cita-cita demokrasi atau kedaulatan rakyat di daerah, maka dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dalam perspektif sejarah, kedudukan dan wewenang DPRD menurut Konstitusi di Indonesia mengalami pasang surut.³⁶

Pada awal kemerdekaan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, yang diterbitkan tanggal 23 november 1945 menyebutkan bahwa DPRD yang saat itu bernama Badan Perwakilan Daerah (BPRD) dipimpin oleh kepala daerah. BPRD berwenang memilih badan eksekutif yang juga dikepalai oleh kepala daerah, yang sekaligus adalah aparat pusat. Jadi sangat jelas bagaimana sangat lemahnya kedudukan DPRD saat itu, begitu pula dengan kewenagannya. Selanjutnya, pada tahun 1948 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1948, barulah kedudukan dan wewenang DPRD terangkat pesat. Berdas arkan undang-undang ini DPRD memegang kekuasaan pemerintah daerah. Di dalam UndangUndang

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 6-23.

³⁶Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.161.

Nomor 2 tahun 1948, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) yang diketuai oleh Kepala Daerah, dan kekuasaan Pemerintah Daerah ada di tangan DPRD. Sedangkan DPD bertanggung jawab kepada DPRD. Ini berarti kedudukan DPRD lebih tinggi dari Kepala Daerah.³⁷

Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959, kemudian mengikis kewenangan DPRD, karena dalam PenPres ini disebutkan bahwa kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Bahkan kepala daerah dinyatakan sebagai alat daerah dan pusat. Dengan penetapan kebijakan ini maka tersirat bahwa kedudukan DPRD berada di bawah kepala daerah karena kedudukannya sebagai alat pusat. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1959, menetapkan bahwa DPRD dan kepala daerah adalah pemerintah daerah. Dengan disajarkannya kedudukan DPRD dan kepala daerah sebagai mitra, bukan berarti mengangkat lembaga ini ini pada posisi yang lebih baik dalam pemerintahan daerah, tapi justru melepaskan lembaga ini dari fungsinya sebagai institusi demokrasi di daerah.³⁸ Penyejajaran kedudukan antara DPRD dengan kepala daerah masih dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, meskipun kepala daerah dipilih dan dicalonkan oleh DPRD. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah, bukan saja mengaburkan fungsi dan peran

³⁷ *Ibid.*, hlm.161.

³⁸ A. Syaukani HR, dkk., *Otonomi Daerah ... Op.Cit*, hlm. 162.

kedua lembaga itu, tapi juga meniadakan sistem kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas pemerintah daerah tidak pernah dipertanyakan. Tiadanya sistem *check and balances* telah memungkinkan kepala daerah tidak mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada masyarakat yang dipimpin melalui wakil-wakil mereka di DPRD.³⁹

C. Tinjauan Umum Investasi dan Penanaman Modal

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.⁴⁰

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim

³⁹ *Ibid.*, hlm. 162-163.

⁴⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 9.

digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.⁴¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.”

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.⁴²

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan

⁴¹ Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm 1.

⁴² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.cit.*, hlm 21.

penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴³

Menurut Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga, yaitu:⁴⁴

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

⁴³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1.

⁴⁴ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm 47.

Selain pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Investasi langsung (*direct invesment*) diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler, partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana dan suatu risiko usaha. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, memberikan bantuan teknis dan material maupun dengan memberikan lisensi.
2. Investasi Tak Langsung (*Portofolio Investment*) diartkan sebagai kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung

kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.⁴⁵

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut.⁴⁶

- a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-sehari.
- b. Pada investasi langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak di lindungi oleh hukum kebiasaan Internasional. Menurut william F.S. investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha, oleh karena itu investasi dibagi dalam beberapa jenis. Dalam praktiknya, jenis investasi dibagi 2 macam yaitu⁴⁷ : Pertama, Investasi nyata (*real invesment*), yaitu investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin. Kedua, Investasi finansial (*financial invesment*), yaitu investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito. Secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu :

⁴⁵ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana , 2013, hlm 19.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 4.

1. Penanaman modal secara langsung (*Direct Investment*) Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.
2. Penanaman modal tidak langsung (*Portfolio Investment*) Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham- saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.⁴⁸

D. Asas Tujuan Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum,

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.

⁴⁸ N.Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia, 2004, hlm 7.

2. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Di samping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah di tentukan sebuah asas yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu bersifat tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal.

Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional. Selain memuat asas-asas dalam penyelenggaraan penanaman modal, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga memuat mengenai tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal. Tujuan penyelenggaran penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing

tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha

E. Tinjauan Umum Kawasan Industri

1. Pengertian Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.⁴⁹ Kawasan Industri dalam definisi tersebut merupakan tempat berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Menurut *National Industrial Zoning Committee's* (USA) 1967, yang dimaksud dengan kawasan industri atau *Industrial Estate* atau sering disebut dengan Industrial Park adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (*utilitas*), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.

Menurut *Industrial Development Handbook* dari ULI (*The Urban Land Institute*), Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan- peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium

⁴⁹Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Perindustrian Bandung, Fokusmedia: 2014, hlm 3.

untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya. Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan atas industrial estates. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut lingkungan industril.

Menurut Marsudi Djojodipuro , kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.⁵⁰

2. Jenis-jenis Atau Macam-macam Industri

Industri di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. Untuk mengetahui macam-macam industri dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, pengelompokan industri yang dilakukan oleh

⁵⁰Lanta Kautsar Akromi, “*Pengertian Kawasan Industri Makalah*” (On-Line), tersedia di: <https://id.scribd.com/document/326691201/Pengertian-Kawasan-Industri-Makalah>” (6 Oktober 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Departemen Perindustrian (DP). Menurut DP, industri nasional di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu:⁵¹

- a. Industri Dasar, yang meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD, yaitu: industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD, yaitu: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat, dan sebagainya.
- b. Industri Kecil, yang meliputi, yaitu: industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastic dan lain-lain), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).
- c. Industri Hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi, yaitu: industri yang mengelolah sumber daya hutan, industri yang mengelolah hasil pertambangan, industri yang mengelolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain.

Kedua, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:⁵²

⁵¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm 453.

- 1) Industri rumah tangga jumlah pekerjanya 1-4 orang.
- 2) Industri kecil jumlah pekerjanya 5-19 orang.
- 3) Industri menengah jumlah pekerjanya 20-99 orang.
- 4) Industri besar jumlah pekerjanya 100 orang atau lebih.

3. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat disimak di dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri pada pasal 2 yang menyatakan pembangunan kawasan industri bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan

Sedangkan, menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada

⁵² Menurut Badan Pusat Statistik diakses pada 24 Januari 2018.

kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.⁵³

F. Tinjauan Umum *Good Governance*

1. Pengertian Tentang *Good Governance*

Pada awalnya Bank Dunia mendefinisikan “*Governance*” sebagai “*the exercise of political power to manage a nation’s affair*” (Davis and Keating, 2000). Bank Dunia juga menambahkan karakteristik normative tentang *Good Governance*, yaitu: “*An efficient public service, and independent judicial system and legal frame work to enforce contract; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure; and free press*”. Sementara itu UNDP mendefinisikan *Good Governance* sebagai “*The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation’s affair at all levels*.”

OECD dan WB mensinonimkan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar bebas, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan

⁵³“Tujuan Pembangunan Kawasan Industriil (On-Line), tersedia di: <http://www.definisipengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri.html> (Mei 2015)

disiplin anggaran serta menciptakan kepastian hukum dan suasana politik untuk tumbuhnya aktivitas kewirausahaan.

Selanjutnya UNDP juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Atas dasar inilah, maka disusun Sembilan karakteristik *Good Governance*, yaitu;

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakilkan kepentingannya.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia
3. *Transparency*. Tranparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.
4. *Responciveness*. Lembaga-lembaga dan propses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*
5. *Concensus Orientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga Negara, baik laki -laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuatan keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga *stakeholders*.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Bappenas dalam Modulnya Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik mengemukakan bahwa konsep tentang *government*, *good governance* dan *good public governance*. Menurutnya secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai “Pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. *Governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/ kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan atau tidak diimplementasikan. UN Commission on Human Settlements menjelaskan bahwa *governance* adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka. Hal ini

merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dimana segala jenis kepentingan maupun kebutuhan dapat di akomodasikan dan tindakan korektif diterapkan. Termasuk pula didalamnya lembaga dan regim formal yang dikuasakan untuk menegakkan kepatuhan, maupun pengaturan secara informal sehingga masyarakat dan lembaga memiliki kesepakatan atau kesamaan kepentingan. *Governance* juga dapat diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2003) sebagai:

- 1) Pemerintahan,
- 2) Pengelolaan pemerintahan,
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan,
- 4) Penyelenggaraan negara, dan
- 5) Administrasi negara.

Istilah *governance* lebih kompleks karena melibatkan tiga pilar *stakeholders*, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau "eksploitasi" oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Istilah *good public governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta

dapat pula di ungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau pun administrasi negara yang baik.

Istilah tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam pendiptaan

lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.⁵⁴

⁵⁴Dr Arifin Tahir, M.,Si., Agustus 2014, *Kebijakan Publik dan Trasnparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, hlm. 102.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Brebes Merujuk Pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi di Jawa Tengah

Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah potensial untuk meningkatkan perekonomian baik pusat maupun provinsi Jawa Tengah dengan potensi kawasan industri bersamaan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Akibat adanya Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah pemerintah dituntut tetap menerapkan prinsip *good governance* dalam setiap aspek proses yang berkaitan dengan usaha peningkatan perekonomian daerah. Perpres 79 tahun 2019 disusun secara simultan dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 13 tahun 2019 (perda induk) tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, apa yang diamanatkan dari perpres sudah diakomodir ada di perda.

Kesiapan Pemerintah kabupaten Brebes dalam menghadapi geliat perekonomian yang dihasilkan dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dapat dikatakan sangat siap dikarenakan perubahan perda tata ruang, perluasan kawasan peruntukan industri dari semula ±400h perda no 2

th 2011 menjadi 5688ha menjadi salahsatu persiapan geliat investor di Brebes.

Kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilaksanakan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi.⁵⁵

Penerapan *good governance* di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:⁵⁶

- a. Tuntutan eksternal: Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan *good governance*. Istilah *good governance* mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia
- b. Tuntutan internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya *juse of power* yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok

⁵⁵ Nazsir, Nasrullah, *Penerapan Konsep "7 Habits Of Highly Effective People"* Dalam Profesi Dosen, Mediator Vol.4 Tahun 2003, Hlm. 138

⁵⁶ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Volume VI No. 1/Juni 2016, Hlm. 7

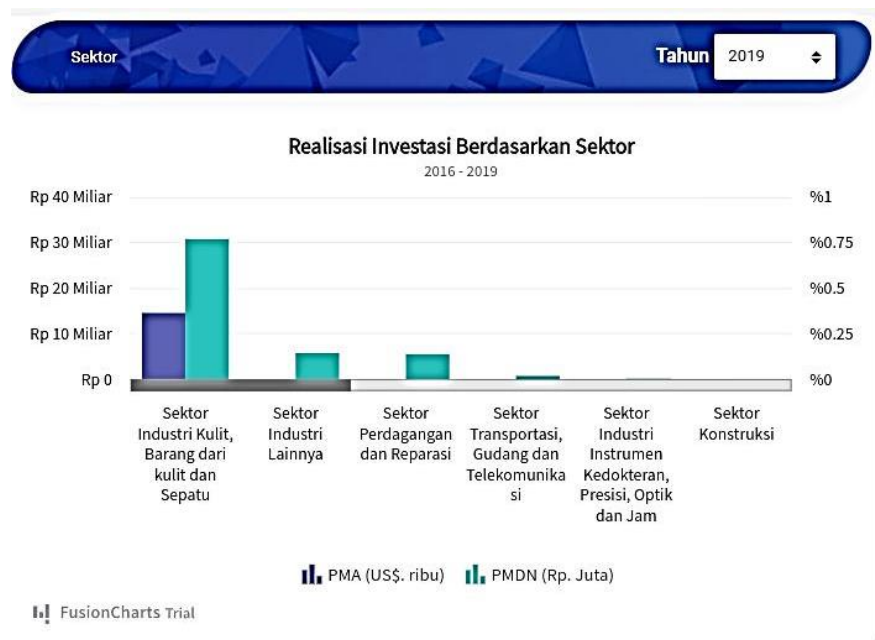
kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Praktek *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*.⁵⁷

Bentuk transparansi Pemerintah Kabupaten Brebes terutama dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 yakni adanya informasi melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui pelayanan publik terutama dalam sektor investasi perindustrian di kawasan Kabupaten Brebes.

⁵⁷Dwiyanti, Melani, *Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), hlm. 4

Gambar 1.1



Terlihat dari gambar 1.1 sumber dari kanal website Kementerian investasi BPKM bahwa tingkat investasi di kawasan Kabupaten Brebes terbilang cukup banyak karena itu lah Pemerintah Brebes dalam mewujudkan prinsip *good governance* yang berkaitan dengan pemulihan dan peningkatan perekonomian di wilayah Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di dalam website Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Brebes juga terdapat beberapa fitur atau komponen pendukung mengenai informasi berkaitan dengan investasi yakni disebut “*Smart Investment*”.

Informasi di website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes mengenai investasi dapat dilihat di bagian *Smart Investment* yang berisikan antara lain :

- 1) Realisasi Investasi
- 2) Promosi Investasi
- 3) Peta Potensi
- 4) LKPM Online
- 5) Pendaftaran Online (OSS)

Selain fitur Smart Investment terdapat juga bagian “KLIP-PENA” atau kepanjangan dari Kanal Layanan Investasi dan Promosi Penanaman Modal.

Jenis Izin Yang Dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

1. Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS

a. Izin Lokasi	f. Izin Pemanfaatan/Pembuangan
b. Izin Lingkungan	Air Limbah Secara Aplikasi Ke
c. Izin Pembuangan Air Limbah Ke	Tanah
Air Permukaan	g. Izin Mendirikan Bangunan
d. Izin Pengelolaan Air Limbah	h. Izin Mendirikan Klinik
Berbahaya dan Beracun	i. Izin Operasional Klinik
e. Izin Pengumpulan Limbah B3	j. Izin Apotek
Skala Kabupaten	k. Izin Toko Obat

l. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	Orang
m. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	v. Izin Usaha Jasa Konstruksi
n. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama	w. Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal
o. Pengelolaan Perizinan Rumah Sakit, Klinik dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	x. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
p. SPP-IRT	y. Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta
q. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	z. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
r. Tanda Daftar Gudang	aa. Izin Mendirikan Grup Kesenian
s. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	bb. Surat Izin Usaha Perikanan
t. Surat Izin Usaha Toko Modern	cc. Izin Usaha Peternakan
u. Izin Penyelenggara Angkutan	dd. Pendaftaran Usaha Peternakan
	ee. Izin Usaha Obat Hewan
	ff. Izin Usaha Veteriner
	gg. Izin Usaha Rumah Potong Hewan

2. Perizinan Berusaha Melalui SIPP

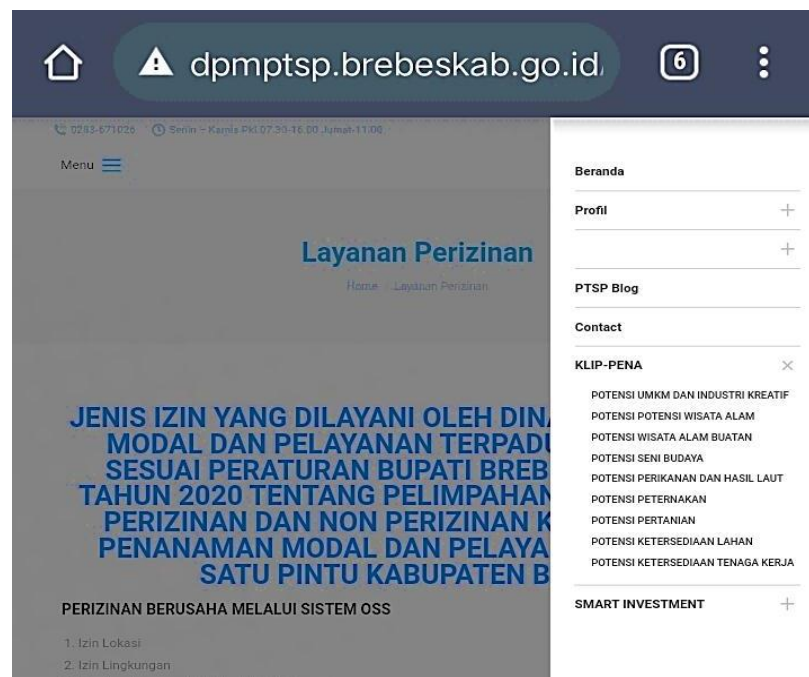
a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

- b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
- c. Izin Optikal
- d. Izin Operasional Puskesmas
- e. Izin Transfusi Darah/Unit Donor Darah
- f. SLS
- g. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan
- h. Izin Panti Sehat
- i. Izin Klinik Pengobatan Paru dan Kusta
- j. Izin Penyelenggara Reklame
- k. Izin Garasi Pool dan Agen Penyelenggaraan Oto Bus
- l. Surat

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

Gambar 1.2 Tampilan Website (mobile phone) DPMPTSP Kabupaten Brebes



Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

Pelaksanaan tugas pelayanan DPMTSP diatur sebagaimana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik DPMTSP Kabupaten Brebes yang disahkan Kepala DPMPTSP Kabupaten Brebes Drs. Ratim pada 6 April 2021 yang mengatur antara lain prosedur pelayanan informasi publik secara langsung, SOP Permohonan Pelayanan Informasi melalui

Telepon, dan/atau email, waktu operasional pelayanan informasi, jangka waktu penyelesaian, Biaya pelayanan, sampai dengan pengaduan keluhan pelayanan.

Berikut susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Program dan Keuangan;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 6. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 7. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 8. Seksi Promosi Penanaman Modal.
9. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari :
 10. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
 11. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 12. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
13. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 14. Seksi Pendaftaran;
 15. Seksi Verifikasi;
 16. Seksi Pemrosesan.

17. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
18. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
19. Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Advokasi;
20. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
21. Kelompok Jabatan Fungsional;
22. Unit Pelaksana Teknis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Institusi *governance* juga harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan member peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Efektif dan efisien merupakan salah satu prinsip dalam *good governance*.

Secara keseluruhan praktik pelayanan publik yang berkaitan dengan peningkatan kawasan perekonomian Jawa Tengah di Kabupaten Brebes dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip *good governance* efektif dan efisien. Hal ini berkaitan dengan pelayanan informasi perizinan dapat diakses melalui website atau secara daring.

Pelayanan perizinan usaha bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Brebes juga dapat melakukan perizinan online melalui website DPMPTSP Kabupaten Brebes yang kemudian diteruskan ke laman website Sistem Online Single Submission (OSS).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah

⁵⁹ Widodo Joko, 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT Insan Cendekia: Jakarta, hlm.24

Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.

B. Kendala Pelaksanaan *Good Governance* Atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah.⁶⁰

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas :⁶¹

- a. Kawasan Kedungsepur yang terdiri atas Kendal - Kota Semarang - Semarang - Kota Salatiga - Demak - Grobogan;
- b. Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo - Wonosobo - Magelang - Kota Magelang - Temanggung; dan
- c. Kawasan Bregasmalang yang terdiri atas Brebes - Kota Tegal - Tegal - Pemalang.

⁶⁰ Lampiran BAB I Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

⁶¹ *Ibid.*

Terdapat tantangan dan/atau kendala tersendiri dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Brebes antara lain :⁶²

1) Aspek Fisik Alam.

Daerah Brebes dan sekitarnya dilalui banyak aliran sungai sehingga membutuhkan penanganan permasalahan banjir, kerusakan DAS, dan penyimpanan air. Rawan terhadap banjir, abrasi, gelombang pasang, dan tanah longsor.

2) Aspek Infrastruktur

Perlunya peningkatan konektivitas antara KI dengan kawasan sekitarnya. Jaringan jalan di wilayah selatan memiliki tingkat kerusakan yang cukup tinggi, terutama di Kabupaten Pemalang dan Brebes. Belum selesainya pembangunan jalan bypass Tegal-Brebes.

3) Perkembangan Sektor Potensial

Keterbatasan sektor agromina industri untuk mengolah bahan baku menyebabkan sektor pertanian dan perikanan kurang memberikan kontribusi.

Selain kendala atau tantangan yang sudah disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor penghambat dari segi pelayanan perizinan terutama di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁶² Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Interaksi wilayah Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019 dikutip dari Lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Bab IV.65

(DPMPTSP) Kabupaten Brebes yakni secara garis besar, permasalahan penerapan *good governance* meliputi :⁶³

- a. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- b. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
- c. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
- d. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
- e. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
- f. Mengingatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
- g. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur, sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para birokrat bekerja dalam sebuah lingkungan yang bermuatan nilai dan lingkungan yang didorong oleh sejumlah nilai, dimana nilai-nilai ini yang akan menjadi

⁶³ Maryam, Siti, N., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 11

pijakan dalam segala aktivitas birokrasi saat memberi pelayanan publik. Terkait dengan pernyataan tersebut, ada beberapa nilai yang harus dipegang teguh para formulator saat mendesain suatu maklumat pelayanan. Beberapa nilai yang dimaksud yakni: kesetaraan, keadilan, keterbukaan, kontinuitas dan regulasitas, partisipasi, inovasi dan perbaikan, efisiensi, efektivitas.⁶⁴

Kendala yang lain yakni yang dikhawatirkan adanya atau maraknya makelar tanah yang menjual harga tanah diatas harga pasar sehingga mempersulit proses pembebasan lahan oleh Pemkab untuk digunakan sebagai kawasan industri. Oleh karena itu Antisipasi makelar mengkondisikan camat dan kades dalam proses pembebasan lahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah industri sehingga harga tanah menggunakan harga taksir guna menghindari harga tanah yang tinggi. Di kawasan industri brebes dihindari adanya jual beli tanah atau pemindahtanahan dengan adanya sosialisasi ke Camat dan Kepala desa.

Kendala selanjutnya dalam pelayanan perizinan menyangkut atas pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 yaitu kanal situs atau website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih dalam proses pengembangan sehingga masih terdapat fitur yang masih dalam proses pembaharuan.

⁶⁴ *Ibid.* hlm.11

Keterampilan dari Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala, jumlah pegawai yang berbanding terbalik dengan luasnya dan banyaknya penduduk wilayah Kabupaten Brebes menjadikan pelayanan belum maksimal sepenuhnya. Selain itu, Sumber Daya Manusia yang masih dalam proses pembelajaran bidang IT untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi arus perizinan mengingat Penerapan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Brebes sudah mulai berjalan.

Permasalahan kendala *good governance* luasnya wilayah untuk menjangkau pelayanan publik dapat mempengaruhi pelayanan, jumlah penduduk, ketersediaan sdm pemerintahan dari sisi kuantitas dan kualitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Brebes merujuk adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi di Jawa Tengah yakni jika dikaitkan dengan prinsip *good governance* untuk penerapan prinsip transparansi sudah berjalan dengan adanya situs atau website yang dapat diakses daring berisi informasi pelayanan perizinan, informasi potensi investasi yang dapat meliputi wilayah, sektor bidang investasi, serta tersedianya pelayanan untuk pendaftaran online OSS. Selanjutnya prinsip akuntabilitas yakni pertanggung jawaban pegawai bekerja sesuai dengan SOP yang telah diatur, Prinsip yang terakhir yakni prinsip efektifitas dan efisiensi yaitu bahwa pelayanan perizinan terpadu guna mendukung perizinan investasi untuk percepatan perekonomian sebagaimana termaktub di Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Pemkab Brebes sudah baik karena untuk meningkatkan waktu dan fleksibilitas terdapat pelayanan secara daring melalui website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *good governance* atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 antara lain aspek

fisik geografis wilayah Brebes yang masih rawan banjir, rob, dan abrasi, kendala SDM pada instansi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang masih kurang memadai serta belum sepenuhnya menguasai secara ahli dibidang IT sehingga situs Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih tahap perkembangan, kendala selanjutnya yakni kekhawatiran maraknya makelar tanah serta pembebasan lahan untuk investor pembangunan industri.

B. SARAN

1. Pembenahan sarana prasarana dan meningkatkan kualitas SDM dalam IT, merancang data yang berisi untuk kemajuan *e-government* menuju *good governance*.
2. Meluaskan sosialisasi mengenai rencana peningkatan perekonomian di Jawa Tengah terutama Brebes ke masyarakat luas sehingga masyarakat tidak kaget jika pembangunan kawasan industri sudah berjalan secara luas serta dibarengi pelatihan kerja untuk warga asli sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2010.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2006.
- Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Trasnparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- H.M, Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta : Total Media, 2013.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Perindustrian Bandung, Fokusmedia: 2014.
- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana , 2013.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT.Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif.Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Marbun, BN, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007.
- Nazsir, Nasrullah, *Penerapan Konsep “7 Habits Of Highly Effective People” Dalam Profesi Dosen, Mediator Vol.4 Tahun 2003*.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997.
- Rahmawati, N.Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia, 2004
- Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Alfabeta, 2010.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- St. Sularto dan T. Jakob Koekerits (penyunting). 1999. *Federalisme Untuk Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas. Atau buku Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (penyunting). 2002. *Kontroversi Negara federal Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sadu Wasistiono, *at a, Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokus Media, 2006.
- Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Winarto, Budi, *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek*, Jogjakarta: Media Pressindo, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Lampiran BAB I Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Artikel Ilmiah / Jurnal

- Andi Hakim, *Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi)*
- Alent R. Tumengkol, Jan-Mar/2015, *Kebijakan Pemerintah dan Pertanggung Jawabannya Dalam Rangka Good Governance*, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015
- Caroline, April 2009, *Perencanaan Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Brebes Sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Universitas Sultan Fatah Demak, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 10, Nomor 1:51-64
- Dwiyanti, Melani, *Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro).
- Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Interaksi wilayah Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019 dikutip dari Lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Bab IV.65
- I Wayan Arthanaya, *Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011.
- Lanta Kautsar Akromi, "Pengertian Kawasan Industri Makalah (On-Line), tersedia di: <https://id.scribd.com/document/326691201/Pengertian-Kawasan-Industri-Makalah> (6 Oktober 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), "Tujuan Pembangunan Kawasan Industri (On-Line), tersedia di: <http://www.definisipengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri.html> (Mei 2015)
- Made Agus Wira Andika dan I Nyoman Sukraaliawan, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng*
- Maryam, Siti, N., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016.
- Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Volume VI No. 1/Juni 2016.

Widodo Joko, 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT Insan Cendekia: Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmed Rifo Alchaqie

NPM : 5117500051

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 15 Juli 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Mardisiswa Rt.08/Rw.01 Kecamatan
Bumiayu, Kabupaten Brebes

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri 03 Pruwatan	2005	2011
2	SMP Negeri 02 Bumiayu	2011	2014
3	SMK Muhammadiyah 01 Paguyangan	2014	2017
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Brebes, 16 Agustus 2021

Hormat Saya,

Achmed Rifo Alchaqie